

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adam Chazawi, 2002, Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, 2024, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers;
- Andi Hamzah, 2008, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta: Sinar Grafika;
- Chaerudin, dkk, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT Refika Aditama;
- Elwi Danil, 2012, Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika;
- Evi Hartanti, 2014, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika;
- Evi Hartanti, 2016, Tindak Pidana Korupsi (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika;
- Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing;
- Joko Sriwidodo, 2020, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Kepel Press;
- Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Bandung: Alumni;
- Marwan Effendy, 2010, Pemberantasan Korupsi dan Good Governance, Jakarta: Timpani Publishing;
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press;

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta;  
Nur Basuki Minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Surabaya: Laksbang Mediatama;  
Retno Ajeng, 2017, *Membasmi Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media;  
Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Media;  
S,R, Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Cetakan Ketiga)*, Jakarta: Stora Grafika;  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

**Jurnal :**

Amalia Fadhila Rachmawati. 2022. "Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum Indonesia." *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, No. 1;  
Fadli M dan Iskandar. 2022. "Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia." *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 3 No. 1;  
Haryono Umar. 2010. "Menghitung Kembali Dampak Korupsi." *Jurnal Dikti*, No. 52/DIKTI/Kep/2010;  
Nani W. Sari. 2018. "Kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 4 No. 2;  
Ummi Kaltsum, Sri Nurhalisah, dkk. 2025. "Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan dan Ketertiban di Masyarakat." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No. 5.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Keputusan BPK RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif.

### **Internet**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Perbedaan Pendapat Jaksa dan Penyidik Penting untuk Tajamkan Penanganan Perkara.” <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Perbedaan-Pendapat-Jaksa-dan-Penyidik-Penting-untuk-Tajamkan-Penanganan-Perkara-57286>

Kejaksaan Tinggi DIY. “Pengertian Kejaksaan.” <https://kejadi-diy.kejaksaan.go.id/pengertian-kejaksaan/>

